

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kertertarikan saya mengerjakan skripsi ini yang berjudul PERANAN LSM YASANTI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA. Terutama Buruh Gendong di Pasar Bringharjo dan untuk mengetahui kehidupan buruh gendong, juga sehari hari sebagai buruh gendong. Mengingat sulit dan rumitnya usaha untuk menjangkau lapisan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sebagaimana dialami berbagai negara sedang berkembang serta badan – badan internasional dalam tiga dasawarsa pembangunan, serta melihat potensi organisasi – organisasi kemasyarakatan tersebut. Hingga kini membahas tentang “organisasi – organisasi kemasyarakatan” disebut dalam pengertian umum, seringkali menurut PBB yaitu NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION (NGO) yang kemudian di Indonesiakan menjadi “Organisasi Non-Pemerintahan (Ornop)”. Dalam arti yang umum ini pengertian “Ornop” mencakup semua organisasi – organisasi masyarakat yang berada di luar struktur dan jalur formal pemerintah pemerintah dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari bentuk birokrasi pemerintah. di dalamnya bisa termasuk serikat sekerja kaum buruh, himpunan para petani, rukun kampung / warga, paguyuban warga desa, ataupun yayasan sosial lembaga keagamaan, perkumpulan mahasiswa, institut pendidikan, klub olahraga, dan organisasi – organisasi profesi partai politik atau asosiasi bisnis swasta. Karena

cakupan pengertiannya yang amat luas itu, maka penggunaan istilah “Organisasi Non - Pemerintah (Ornop)’ sering membingungkan dan juga bisa mengaburkan pengertian organisasi atau kelompok masyarakat yang semata – mata bergerak dalam rangka pembangunan sosial ekonomi masyarakat tingkat bawah yang menjadi fokus pembahasan artikel ini. Almarhum Dr. Sarino Mangunpranoto, seorang tokoh Taman siswa yang semasa hidupnya banyak bekecimpung dalam usaha pembangunan masyarakat desa, juga tidak setuju penggunaan istilah “Ornop” itu, karena dalam konteks indonesia istilah itu seolah – olah memberi kesan organisasi tandingan bagi pemerintah yang bisa saja diartikan berlawanan atau menyaingi pemerintah, sehingga beliau lebih cenderung memakai istilah “Lembaga Pembina Swadaya Masyarakat (LPSM)”, karena pengertiannya bukan hanya sebuah organisasi, melainkan lebih mencerminkan gerakan kemanusiaan yang membina swadaya masyarakat, dengan pola dasar “Membangun Sumberdaya Manusia “ (Development of Humen Resources)”¹.

Apapun istilahnya, organisasi non-pemerintah atau organisasi kemasyarakatan tersebut pada dasarnya menurut pandangan sosiologis dapat membedakan dalam dua kelompok besar ; pertama, “Kelompok Primer’ (Primary Groups), yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai aspirasi dan kegiatan bersama dengan ciri hubungan yang dekat intim sekali serta bersifat sukarela, dimana interaksi di antara para anggota terjadi dari hari ke hari dan secara tatap muka, untuk berbagi urusan saling tolong – menolong yang menyangkut segala

¹ Uraian tentang ini lihat Ismid Hadad, “ *Peranan Lembaga – Lembaga Non- Pemerintah dalam pengembangan Teknologi Pedesaan.* “dalam Widwakarya Nasional Teknologi Pedesaan. LIPI

kepentingan bersama kelompok tersebut. Kelompok ini biasanya merupakan komunitas kecil dan berada di lapisan bawah, yaitu umumnya komunitas desa atau kampung (*Grass - Root Communities*) seperti rukun kampung, rukun warga, paguyuban desa, kelompok usaha bersama, dan sebagainya, yang dalam istilah pembangunan dewasa ini “Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)”. Dan yang kedua ialah, “kelompok Sekunder” (*Secondary / Intermediate Groups*) yaitu kelompok masyarakat atau organisasi yang tumbuh dari tengah masyarakat yang para anggotanya mempunyai kepentingan bersama untuk melakukan usaha atau kegiatan bersama dalam lingkup dan skala yang relatif terbatas, untuk mencapai suatu kemasyarakatan yang tidak mengejar keuntungan materiil semata – mata. Kelompok ini biasanya lebih besar dan lebih teroganisir, para anggotanya lebih banyak bahkan mempunyai jaringan hubungan yang luas dengan kelompok – kelompok primer, namun cara komunikasi satu sama yang lain tidak selalu langsung dan interaksi di antara mereka tidak harus sering terjadi. Mengingat umumnya corak kegiatan ataupun tujuan kelompok sekunder ini untuk menumbuhkan dan mengembangkan swadaya kelompok – kelompok primer, maka belakangan kelompok ini sering disebut sebagai “Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM)”. Termasuk dalam kelompok sekunder atau LPSM ini ialah serikat kaum buruh, himpunan para petani, serta perkumpulan, lembaga, yayasan, panitia, paguyuban dan lain – lain bentuk organisasi yang secara langsung bergerak dalam usaha pembinaan dan pengembangan masyarakat. Penggunaan istilah “Ornop” memang terlalu luas arti dan implikasinya. Karena bukan saja berarti organisasi pembangunan masyarakat seperti LSM dan LPSM

namun mencakup pula organisasi profesi, organisasi politik seperti partai politik dan organisasi massa (Ormas)-nya – maupunosiasi bisnis swasta yang komersial. Maka untuk menghindari pengertian yang terlalu luas dan bisa membingungkan itu sejak 1978 organisasi – organisasi kenasyarakatan yang bergerak dalam pembangunan sosial ekonomi, khususnya dalam pengembangan masyarakat pedesaan di Indonesia, tidak lagi mengunaan istilah “Ornop” melainkan menerapkan istilah LSM dan LPSM yang dianggap lebih sesuai dengan citra dan corak kegiatan mereka yang sebenarnya. Kemudian dalam suatu seminar nasional mengenai peranan organisasi – organisasi tersebut dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan oleh sekretaritan Bina Desa dan Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) pada Oktober 1981, istilah “Organisasi Non-Pemerintah (Ornop)” resmi diganti dengan “Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM)”. Dalam uraian tulisan ini pun istilah “Ornop” tidak digunakan, Namun karena istilah LSM belum populer atau belum cukup jelas artinya bagi orang awam,dan lagi karena dalam pengertian LPSM tidak termasuk lembaga – lembaga yang secara tidak langsung membina masyarakat seperti misalnya lembaga studi, lembaga penelitian, biro konsultasi ataupun penerbitan maka untuk menampung pengertian LPSM dalam konteks yang lebih luas itu, hingga kini masih dipergunakan istilah “Lembaga Pembangiunan Non - Pemerintah”. Namun untuk selanjutnya, akan lebih banyak diterapkan istilah LPSM, yang lebih khusus kaitanya dengan fungsi pengembangan swadaya masyarakat yang menjadi fokus kita. Sedangkan “Lembaga Swadaya Masvarakat (LSM)”. Dalam tulisan ini dianggap sebagai

sasaran LPSM atau sasaran pembinaan lembaga pembangunan Non-Pemerintah. Agar lebih jelas, yang dimaksud dengan “lembaga – lembaga pembangunan non-pemerintah” ataupun “lembaga pengembangan swadaya masyarakat (LPSM)” yang menjadi fokus membahas artikel ini, adalah seperti beberapa contoh ilustrasi berikut ini: perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS), Yayasan Sosial Tani Membangun (YSTM), Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Sekretariat Bina Desa (INDHRRA), Yayasan Dian Desa (YDD), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Yayasan Kristen untuk Kesejahteraan Umum (YAKKUM), Yayasan Taman Karya Bhakti (YTKB), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yayasan Lembaga Konsumen (YLK), Persatuan Wanita Republik Indonesia (erwari), Yayasan Pengembangan Kerajinan Rakyat Indonesia (Pekerti), Yayasan Bali Canti Sene, Koperasi Setiabudi Wanita (SBW), Yayasan Pendidikan Lestari, Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP), Lembaga Wira Koperasi Indonesia (Wirakop) serta berbagai lembaga dan perguruan yang telah bergerak dibidang pendidikan dan sosial-keagamaan seperti Perguruan “Taman Siswa”, PKU “Muhamadiyah”, Dharma Cipta “Dewan Gereja – Gereja Indonesia “ (DC-DGI), maupun sejumlah pondok – pondok Pesantren seperti “Pabelan”, “Darul Falah”, “Cipasung”, “Guluk – guluk”, “Tebuireng”, “Maslakul – Huda”, “Darussalam”, “Suralaya”, dan lain sebagainya yang mulai banyak melakukan usaha pembangunan masyarakat pedesaan dan sekitarnya. Deretan daftar nama – nama organisasi

tersebut masih lebih panjang lagi dan tak mungkin disebut semuanya di sini, karena yang tercatat dalam katalog sekretariat Bina Desa saja misalnya sudah berjumlah sekitar 200 organisasi / lembaga pada sekretariat Wahana Lingkungan Hidup juga terdaftar sekitar 300 anggota LPSM / LSM, belum lagi pada sekretariat DNIKS dan bahkan ribuan LSM di berbagai daerah yang tidak tercatat sama sekali.

Dengan demikian, mengingat ciri utama dan pola pendekatan LPSM tersebut di atas, maka dalam melihat dan menilai kegiatan – kegiatan pembangunan yang mereka lakukan, ukuran terpenting dari keberhasilan atau kegagalan LPSM bukan terletak pada besarnya materi (*output*) yang mereka hasilkan, akan tetapi pada akhirnya harus dilihat dari seberapa jauh proses transisi ke arah tumbuhnya swadaya masyarakat yang menjadi sasaran pembinaan LPSM itu secara efektif telah tercapai atau tidak. Makin tinggi tingkat kemampuan dan swadaya kelompok sasaran (yakni LSM - LSM yang jadi partner / dibina LPSM) yang dicapai, makin berkurang kebutuhan kelompok sasaran itu akan kehadiran LPSM dan karenanya berarti makin berhasil tergantung pada bantuan yang diberikan oleh LPSM, berarti LPSM telah gagal menjalankan missinya untuk menumbuhkan swadaya masyarakat yang menjadi partner atau sasaran kegiatan. Jelas bahwa tugas, tanggungjawab dan citra yang diemban para LPSM dalam mewujudkan pengabdian mereka pada masyarakat tidaklah mudah dan sederhana. Banyak sekali faktor dan hambatan yang menghadang dan mempengaruhi kegiatan mereka dalam mewujudkan tanggungjawab dan citra yang ideal tersebut.

Karenanya dan uraian berikut ini akan dibahas berbagai faktor yang

memperngaruhi efektivitas LPSM dalam mencapai tujuan mengembangkan swadaya masyarakat tersebut. Tujuan itu lebih difokuskan kepada faktor – faktor interen yang terdapat dalam diri LPSM itu sendiri, sendiri struktur organisasi, pola kepemimpinan, komposisi anggota strategi dan tujuan, tingkat operasi dan sebagainya, serta hubungan dengan kelompok sasaran masyarakat sekitarnya, dengan sumber – sumber dana dan daya yang menuju kegiatan LPSM, serta berbagai tipologi dan program LPSM terhadap pembangunan masyarakat pada umumnya.

Untuk itu peranan LSM di Indonesia di dalam kaitan ini LPSM bukan hanya perlu pengakuan akan eksistensi dan hak – haknya yang sah untuk peranan serta dalam proses pembangunan nasional, akan tetapi juga kesempatan, ruang gerak untuk mewujudkan peranan tersebut, bahkan juga otonomi untuk melaksanakan misi dan programnya menurut prakarsa, cara dan polanya dan polanya sendiri. Sudah tentu semua itu harus dilaksanakan LPSM dalam dalam batas – batas kerangka Repelita dan GBHN yang telah diterapkan rakyat melalu wakil – wakilnya dalam MPR, serta tidak boleh bertentangan ataupun menyimpang dalam landasan UUD'45 dan falsafah Pancasila. Karena keberhasilan dan efektivitas LPSM menjalankan fungsinya tidak hanya tergantung dari niat dan usahanya sendiri, maka dalam melaksanakan program – program pembangunan dan usahanya sendiri, maka dalam melaksanakan program – program pembangunan dan usaha pengembangan swadaya masyarakat, pemerintah seyogyanya melihat dan memanfaatkan kehadiran LPSM secara optimal jadi tidak harus meleharkan sapan atau iaringan aparatnya hingga bisa mevesakkan ruang

gerak masyarakat serta peranan LPSM di dalamnya. Artinya, harus ada kesediaan pemerintah untuk membatasi peranan sektor negara, dan lebih memberi kesempatan pada sektor masyarakat untuk berperan dalam kegiatan pembangunan.

Dengan lahirnya LSM di Indonesia itu kondisi hubungan pemerintah dan masyarakat seperti itu, apa yang digariskan GBHN 1983 bahwa “dalam Pelita Keempat akan terciptanya kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh berkembang atas kekuatannya sendiri”, pasti tidak terasa lagi sebagai tugas pemerintah yang berani, bahkan mudah menjelma menjadi tanggungjawab seluruh rakyat sehingga sasaran repelita IV tersebut pasti tidak akan sulit tercapai.

Ada jenis – jenis beberapa LSM antara lain :

- Organisasi Sukarela (OS) yang melakukan misi sosial, terdorong oleh suatu komitmen kepada nilai – nilai yang sama.
- Kontraktor Pelayanan Umum (KPU) yang berfungsi sebagai usaha tanpa laba berorientasi pasar untuk melayani kepentingan umum.
- Rakyat (OR) yang mewakili kepentingan anggotanya, mempunyai pimpinan yang bertanggungjawab kepada anggota, dan cukup mandiri.
- Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerintah (LSMP) dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah.

Dalam kaitannya dengan tugas nasional dan tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakan pembangunan, pada hakekatnya dapat disebut tiga jenis fungsi atau peranan LPSM : pertama, fungsi yang bersifat komplementer, dalam arti bahwa LPSM dapat berfungsi melakukan kegiatan - kegiatan pembangunan

masyarakat dalam bidang, sektor ataupun daerah, yang karena satu dan lain hal, tidak digarap atau belum termasuk dalam program pembangunan pemerintah. Kedua LPSM dapat melakukan fungsi subsider atau peranan tambahan, dalam arti LPSM hanya berperan untuk memberi dukungan, menunjang atau menjadi pelaksana dari program – program pembangunan pemerintah yang ada ditujukan kepada kelompok – kelompok sasaran masyarakat yang telah menjalin hubungan baik dengan LPSM yang bersangkutan. Dan ketiga, LPSM melakukan fungsi penghubung perantara, yakni dalam hal lembaga - lembaga birokrasi dan program pemerintah tidak atau belum dapat menjangkau lapisan bawah, dan sebaliknya jika masyarakat di tingkat bawah, dan sebaiknya jika masyarakat tingkat bawah tidak mungkin menjangkau / memperoleh bantuan dan fasilitas yang disediakan pemerintah, maka LPSM dapat berperan untuk menghubungkan atau menjadi perantara yang aktif antara masyarakat di tingkat bawah dengan pemerintah di tingkat atas. Dengan demikian LPSM bisa membantu pemerintah dalam membuat program – program pemerintah terjangkau oleh rakyat kecil dilapisan bawah dengan cara memberi informasi tentang dan pelayanan untuk program pemerintah, atau dengan memberi bahan – bahan masukan kepada para perencana dan desakan pada instansi pemerintah agar menyalurkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Semua fungsi atau peranan tersebut di atas tidak harus selalu terpisah atau berdiri sendiri, karena seringkali LPSM justru melakukan gabungan dari fungsi – fungsi tersebut demi efektivitas kehadirannya dalam masyarakat

Ini sebabnya meskipun sesuatu konvensi internasional selalu “Ideal” tetapi tidak semua negeri mau meratifikasinya. Ratifikasi terhadap konvensi penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sudah dilakukan 18 tahun yang lalu tanpa apa – apa. sebab dengan “modal perkawinan” tanpa diskriminasi berarti perkawinan kita bukan lagi menjadi bagian dari hukum sekuler. Disini sebuah jurang perbedaan yang amat dalam membentang, jelas ketentuan yang kuat bernuansa HAM (HAK – HAK ASASI MANUSIA) ini bersifat sekuler pula. sudah banyak kita dengar, bahwa perempuan tidak boleh lagi didiskriminasi dimana dan kapanpun. Sejak tahun 1984 Undang – Undang RI nomor 7 tahun 1984 indonesia telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN / CEDAW). untuk itu didalam masalah yang ada semenjak 18 tahun yang lalu berdiri LSM – LSM yang membantu perempuan untuk mewujudkan hak perempuan dan laki – laki sama.

Dalam hal yang menyangkut tentang peranan LSM Yasanti dalam pemberdayaan perempuan di yogyakarta, Sejauh mana pengaruh LSM Yasanti untuk membentuk perempuan – perempuan yang berkerja di kantor, perusahaan atau di tempat pabrik yang ada di yogyakarta. Terutama program pendampingan buruh gendong yang penelitian yang ada. Sekitar 150 buruh gendong dan terorganisir dalam paguyuban sekitar 500 buruh gendong, untuk itu di dalam pendampingan ini yang terbentuk dan mendorong usaha – usaha mewujudkan kehidupan berorganisasi buruh yang idenpenden dan demokrasi. Menumbuhkan

kesadaran kritis komunitas buruh khususnya buruh perempuan melalui pengorganisasian, pendidikan dan advokasi. Yayasan Annisa Swasti membantu / memfasilitasi pembentukan organisasi buruh basis yang Independen dan Demokratis, menawarkan program – program yang memenuhi / menjawab langsung tuntutan – tuntutan nyata buruh : upah, jaminan, dan hak, pengetahuan perburuhan dan juga penyelesaian konflik horizontal antara buruh. Untuk itu Yasanti mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, bebas dari ketidakadilan gender yang juga mempunyai kesempatan dan kemampuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

B. Perumusan Masalah

Dalam mencapai peranan LSM dalam memperdayakan kaum buruh perempuan dan usaha meningkatkan potensi hak – hak perempuan yang seimbang dengan laki – laki. Dari latar belakang masalah ini penulis ingin merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana peranan LSM Yasanti dalam perdayaan perempuan di Yogyakarta?

(Studi Kasus Terhadap Buruh Gendong Perempuan di Yogyakarta Tahun 1999 – 2000).

C. Kerangka Dasar Teori

1. Pengertian LSM

LSM lahir dari kekecewaan beberapa aktivis 66 yang sangat berharap orde baru melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang, terutama ekonomi. Harapan tersebut ternyata tidak menjadi kenyataan. LSM segera

menyatakan diri Idependen dari negara, bekerja memperkuat posisi masyarakat sipil. Namun muncul perkembangan berikutnya sehubungan dengan sentralisme negara dalam melaksanakan politik pembangunan yang tidak menyertakan kepentingan rakyat. Jalur – jalur LSM juga banyak mendorong lahirnya organisasi – organisasi wanita, konon setelah melihat kaum wanita juga menjadi korban yang diperparah oleh adanya politik gender orde baru. Organisasi wanita LSM mempunyai sikap dan peran politik menolak kooperasi orde baru, juga membela dan membawa suara wanita yang terapresiasi orba. LSM wanita pertama muncul tahun 1982 di yogyakarta dengan nama Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) Programnya membina buruh dan petani perempuan. Dua tahun kemudian muncul Yayasan Kalyanamitra di jakarta. Sejak awal yayasan ini melakukan kegiatan dengan buruh wanita, lalu memposisikan organisasinya dikalangan menengah dan secara khusus memberi supporting informasi persoalan ke jaringan LSM. Sebelum menyangkut persoalan tentang organisasi lain, kita lihat tentang peranan LSM dan fungsi ada fungsi tiga jenis yang pertama, Fungsi yang bersifat komplementer, dalam arti bahwa LSM / LPSM dapat berfungsi memlakukan kegiatan – kegiatan pembangunan masyarakat dalam bidang, sektor ataupun daerah yang karena satu dan hal, tidak digarap atau belum termasuk dalam program pembangunan pemerintah. Kedua LPSM dapat melakukan fungsi subsider atau peranan tambahan, dalam arti LPSM hanya berperan untuk memberi dukungan, menunjang atau menjadi pelaksanaan dari program – program pembangunan pemerintah yang ada dan ditunjukkan kepada kelompok – kelompok sasaran masyarakat yang telah menjadi

hubungan baik dengan LPSM yang bersangkutan. Ketiga, LPSM melakukan fungsi penghubung atau perantara, yakni dalam hal lembaga - lembaga birokrasi dan program pemerintah tidak atau belum dapat meninjau lapisan bawah, dan sebaliknya jika masyarakat tingkat bawah tidak mungkin menjangkau / memperoleh bantuan dan fasilitas yang disediakan pemerintah, maka LPSM dapat berperan untuk menghubungkan atau menjadi perantara yang aktif antara masyarakat di tingkat atas, bahwa Setelah itu Organisasi – organisasi dengan identitas wanita LSM bermunculan, diantaranya solidaritas perempuan (Jakarta), Yayasan Perempuan Mardika (Jakarta), PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Jakarta), APIK (Asosiasi Perempuan untuk Keadilan Jakarta), LSPPA (Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak Yogyakarta), SBPY (Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta), Rifka Annisa (Yogyakarta), Divisi Advokasi Solidaritas Perempuan (Jakarta). APIK didirikan oleh 7 orang wanita pengacara di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 1995. APIK bertujuan untuk ikut mewujudkan masyarakat yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan – lelaki dalam segala aspek kehidupan. Prioritas yang diambil adalah mewujudkan sistem hukum yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan - lelaki, yang oleh ciri - ciri tidak terjadi marginalisasi, subordinasi, stereotyping, kekerasan secara fisik, mental dan seksual serta tidak terjadi beban berlebihan dalam satu pihak. Tujuan tersebut akan dicapai dengan berpedoman pada nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan non sektarian anti kekerasan dan nilai – nilai kelestarian

lingkungan. Sedangkan divisi advokasi solidaritas perempuan yang dikoordinasi oleh Yuniyanti Chuzaifah bertujuan menangani perempuan pekerja migran (TKW). Sodaritas perempuan ini mencoba memperbaiki kondisi lewat berbagai bentuk misalnya dialog dengan pemerintah, mengajak masyarakat ikut peduli dengan TKW juga, melakukan demonstrasi. Kenyataannya kebanyakan LSM cenderung mengambil langkah oprasional praktis dalam berperan, sehingga terkesan aktivitas mereka tidak mempengaruhi perubahan kebijaksanaan yang ada. Menurut para aktivis LSM, langkah praktis yang bersifat nyata bisa dilakukan dengan memotori rakyat untuk memprotes kebijakan atau melakukan unjuk rasa. Dengan cara ini diharapkan para penentu kebijakan dapat mempertimbangkan suara – suara rakyat. Didalam kelembagaan dan pengorganisasian LSM menjadi fasilitator bagi organisasi yang berkecempung dibidang lembaga bantuan seperti organisasi Yasanti yang menangani buruh perempuan dan juga penyelesaian konflik para buruh dan program pendampingan.

2. Peranan²

Adalah prilaku yang diharapkan akan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Sedangkan teori peranan memiliki asumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga memiliki pola prilaku tertentu pula.

² Penjelasan tentang *Teori Peranan* ini diambil dari Alam C. Isaak, *Scope and Methods of Political Science* (Homewood, Illionis : Dorsey Press, 1981), pp. 254 – 257.

Pengertian peran menurut Jack C. Plano, Robert E Riggs dan Hellena S. Robin adalah sebagai berikut:

“Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.”³

Pendapat lain mengenai definisi peranan diungkapkan oleh Balock sebagai berikut :

“Suatu konsep yang dipakai oleh sosiolog untuk mengetahui pola tingkah laku yg teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sosial dengan tuntutan yang dilakukannya”.⁴

Dari pendapat di atas bahwa konsep peranan berhubungan dengan perilaku dan tingkah laku seseorang atau kelompok karena tuntutan dari pososo yang didudukinya untuk mempengaruhi pengambilan maupun pelaksanaan keputusan yang sah bagi masyarakat.

Peranan menurut Astrid S. Susanto sedikitnya mengandung tiga hal, yaitu :

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

³ Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Hellena S. Robin, Terjemahan oleh Edi S. Siregar, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Kedua, 1998, hal 220.

⁴ Herbert M. Bloch Jr. *Pengantar Penelitian Sosial*. Terjemahan Tim Penerjemah Yosogama

2. Peranan adalah suatu konsep perihak apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.⁵

Dari ketiga hal tersebut yang terpenting adalah interaksi antar seseorang yang menjalankan peranan orang yang ada disekitarnya. Ketika interaksi berlangsung dalam kelompok masyarakat, maka individu yang dapat memberi pelayanan lebih serta memiliki kelebihan ganjaran sosial lebih sedikit akan cenderung menentukan interaksi. Dengan kata lain, individu memiliki kedudukan yang dominan atas individu lainnya, dimana ia mempunyai kekuasaan. Sementara itu kedudukan yang dominan dapat pula diperoleh dengan sumber yang lain. Selain kekayaan dan kehormatan, ada juga unsur lain yaitu pengetahuan serta ketrampilan yang diperoleh secara periodik.

Status yang dimiliki seseorang tidak lepas dari peranan - peranan yang dilakukan orang tersebut dalam masyarakat. hal ini terjadi karena sistem sosial adalah bentuk interaksi yang bersifat timbal balik. Besarnya peranan seseorang atau organisasi terhadap lingkungan sosialnya sangat berpengaruh pada status seseorang, demikian sebaliknya status yang tinggi adanya peranan yang tinggi.

⁵ Astrid S. Susanto *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bina Cinta. Jakarta. 1983. hal 95

3. Di dalam menangani masalah perempuan ada beberapa LSM wanita yang muncul tahun 1982 sebagai berikut :

a. **LSM Yayasan Annisa Swasti (Yasanti)**

Programnya membina buruh dan petani perempuan dengan tujuan dapat melakukan penguatan dalam arti dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan baik secara ekonomi, sosial maupun politik. YASANTI terdiri dari dua badan yaitu badan pengurus dan pengurus harian. Badan pengurus merupakan jajaran para pendiri Yayasan Anisa Swasti yang terdiri dari 6 orang. Keanggotaannya mereka bersifat pasif dan tidak turut dalam kegiatan harian. Pengurus Harian adalah para pengelola Yayasan dan Annisa Swasti yang secara penuh dalam seluruh kegiatan harian yayasan. Struktur pengurus harian terdiri dari Direktur Esekutif yang dibantu oleh staf yang duduk dalam divisi – divisi.

Kegiatan YASANTI secara garis besar dibagi dalam 3 divisi sebagai berikut :

1) Divisi Penguatan Organisasi di Tingkat Basis

Merupakan divisi yang melakukan pengorganisasian dan penguatan di komunitas dampingan. Kegiatan – kegiatan tersebut adalah :

a) Buruh Sektor Industri

- Pendampingan kelompok.
- Pendidikan dan Pelatihan Perburuh (Pengorganisasian, Penyadaran Gender, Advokasi, Kepemimpinan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan lain-lain)

- Diskusi Reguler
 - Jaringan.
- b) Buruh Gendong di Yogyakarta
- Pendampingan Kelompok
 - Pendidikan dan Pelatihan (Pengorganisasian, Penyadaran Gender, Kepemimpinan, Kewirausahaan, Kesehatan Reproduksi, dan lain-lain)
 - Pendidikan bebas buta huruf
 - Diskusi Reguler
 - Kelompok UB (Usaha Bersama)
 - Jaringan.

2) Divisi Adminitrsi dan Kesekretariatan

Divisi ini menangani urusan adminitrasitif yang menunjang seluruh kegiatan di YASANTI meliputi pengelolaan keuangan. Kesekretariatan yang lebih bersifat Internal.

3) Divisi Kajian dan Dokumentasi

Kegiatan divisi Kajian adalah membuat penerbitan, pengumpulan informasi, analisis dan pengajian tentang perburuhan, gender dan perempuan.

Kegiatan divisi Dokumentasi adalah melakukan pengelolaan perpustakaan, pembuatan dokumentasi berupa foto, rekaman proses

Yayasan Annisa Swasti tercatat sebagai badan hukum dengan akte notaris dari Umar Syambudi,SH nomor 52/28 September 1982 dan terdaftar di pengadilan Nege-i Jogjakarta pada hari senin tanggal 25 Nopember 1982, dengan 183/82/4.

Di dalam persoalan buruh,peran LSM dalam pemberdayaan buruh itu,adalah peranannya LSM baik dan tidak salah untuk menangani masalah perburuhan. Di perusahaan, kita lihat unit kerja berunding dengan manajer perusahaan yang nantinya melahirkan KKB. Selama LSM membantu unit kerja, baik-baik saja, umpamanya: membikin kursus keterampilan pada hari minggu;membantu tingkat kesadaran para pekerja untuk berorganisasi;membantu para pekerja supaya mengetahui UU tidak semua pekerja menguasai UU ketenagakerjaan, misalnya hak cuti, hak lembur dan hak – hak buruh lainnya;dan mengajarkan para pekerja untuk berunding. Tetapi selalu saya katakan, LSM tidak boleh menggantikan atau menjadi serikat buruh. Tugas LSM meningkatkan kesadaran orang.Untuk itu LSM di mata masyarakat itu membantu mengubah buruh menjadi yang tidak lemah dan pembangunan ekonomi masyarakat buruh yang baik.

Untuk persoalan-persoalan tersebut memunculkan keprerhatian bagi sesama perempuan. Berangkat dari keprihatinan itulah muncul keinginan untuk memikirkan dan menangani persoalan tersebut. Untuk itulah YASANTI (Yayasan Annisa Swasti) hadir, dengan tujuan penguatan menuju kemandirian perempuan

4. Pemberdayaan Perempuan

Apabila dilihat dari historisnya perjuangan perempuan Indonesia dalam bidang politik ternyata perempuan Indonesia cukup tinggi keterlibatannya dalam sektor politik, peranan perempuan dalam bidang politik sudah sejak dulu, misalnya Cut Nyak Dien dari Aceh, R.A Kartini dari Jepara dalam bidang pendidikan, Nyai Ahmad Dahlan, R Dewi Sartika dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaannya melawan penjajahan bangsa asing kemudian berusaha merebut kemerdekaan serta menghadapi gejolak yang terjadi di dalam negeri. Pada saat sekarang ini pemberdayaan perempuan dalam bidang politik sangat diperlukan guna mencapai proses demokratisasi yang berbasis kedaulatan, dimana tidak ada perbedaan antara kaum perempuan maupun kaum laki – laki dalam jabatan politik baik itu anggota parlemen, legislatif maupun dalam jabatan yudikatif sehingga tercipta suatu ketidakadilan yang benar – benar menjunjung tinggi nilai demokratisasi tanpa memandang jenis kelamin mereka. Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam memberdayakan perempuan.

a. Faktor Budaya

Kebudayaan adalah suatu proses di antara sistem sistem dalam suatu masyarakat. Sistem tersebut kekuasaan sistem ekonomi, sistem kepercayaan dan sistem sosial. Kebudayaan adalah suatu proses interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan yang bisa membuat suatu aturan atau norma.³

³ Arif Budiman " Teori Negara Ideologi dan kekuasaan " (Jakarta PT Gramedia 1996) hal 50 - 51

Menurut Arief Budiman dalam bukunya Teori negara dan kekuasaan dan ideologi faktor budaya adalah :

“Faktor Budaya adalah semua faktor yang berhubungan dengan ide-ide atau nilai yang dihayati oleh seseorang atau masyarakat dalam alam pikirannya ”.

Sedangkan menurut Taylor Budaya adalah :⁶

“Budaya dalam arti yang luas terdiri dari produk – produk tindakan dan interaksi manusia termasuk cipta, karya manusia berupa materi dan non materi”. Kebudayaan non materi keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan dan kemampuan - kemampuan dan taat cara lainnya yang diperoleh manusia dalam masyarakat.

Jadi nilai atau ide yang mempengaruhi tingkat laku manusia ini bisa merupakan nilai atau ide yang datang dari masa lalu berupa tradisi atau kebiasaan yang sudah melekat pada sebuah masyarakat sedangkan menurut Muttulada menjelaskan bahwa adanya budaya yang seperti ini akan melahirkan sebuah sistem politik yang otoriter rakyat akan takut untuk mengambil inisiatif untuk “Melawan” pemerintah yang mempunyai hak untuk menguasai mereka. Menurut Mattulada perubahan ini akan terjadi apabila dimulai dengan dari lapisan atas masyarakat sehingga akan sulit terjadi sistem politik yang demokratis.

⁶ Durkheim” Ilmu sosial Dasar Teori dan konsep Ilmu Sosial” (Bandung, PT. Deeresco, 1993)

b. Faktor Sosial Ekonomi

Kalau kita berbicara tentang perubahan sosial yang mempengaruhi lebih baik kita terlebih dahulu harus melihat kondisi obyektif yang terjadi di lingkungan sekitar kita salah satunya adalah faktor sosial suatu masyarakat atau suatu rejim tersebut. Menurut *Cardoso yang di maksud dengan faktor faktor sosial adalah kombinasi dan interksi dari kekuatan-kekuatan sosial di dalam masyarakat*⁷.

Sedangkan Marx dengan teori keterasingannya (*Alienation*), untuk melihat nasib perempuan di mana juga ditekan oleh kapitalis maupun patriarki sehingga tidak memungkinkan mereka untuk mencapai nilai – nilai esensinya sebagai perempuan dan manusia.

c. Faktor Agama

Dalam beberapa tahun terakhir ini masalah perempuan di Indonesia menjadi perkembangan yang sangat pesat, yang membahas tentang pentingnya perempuan dalam proses transformasi masyarakat. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa antara wanita dan pria sama sekali tidak ada diskriminasi. Yang membedakan antara satu dengan yang lain itu diukur dengan kriteria "*Ketaqwaannya*". Misalnya saja yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kedudukan wanita.

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki – laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku supaya kamu saling kenal – mengenal. Sesungguhnya orang yang paling diantara kamu disisi Allah

ialah orang yang paling berqawadi atara kamu. Sesungguhnya Allah sangat mengetahui lagi maha Mengenal " (AL Hujarat ayat 13).

5. Gender

Sejak sepuluh tahun terakhir kata *jender* itu sendiri telah mengalami pembendaraan di setiap diskusi dan tulisan di sekitar perubahan sosial dan pembangunan dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non - pemerintah diperbincangkan masalah Jender. Untuk memahami konsep Jender harus dibedakan kata Jender dengan kata Sex (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep lainnya adalah konsep Jender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki - laki maupun perempuan, yang konstruksikan secara sosial maupun kultural. Jadi apa yang sesungguhnya Jender, karena pada dasarnya konstruksi sosial, justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Dewasa ini, justru sering dianggap atau dinamakan sebagai kodrat "Kodrat Wanita" adalah konstruksi sosial dan kultural atau Gender.

6. Buruh Gendong

Di dalam penelitian dalam analisis LSM Yasanti dalam program pendampingan yang dilakukan dalam pembelaan hukum / kelompok

pendidikan, penerbitan dan pelatihan. Dan dalam analisa data yang dikaji dalam yayasan Annisa Swasti itu pendampingan buruh gendong. Kelompok buruh ada sekitar 500 buruh gendong yang menjual dipasar – pasar dan tempat – tempat yang sering mereka kunjungi, dan selanjutnya mereka mendirikan paguyuban yang sering mereka kunjungi, yang sering diadakan sebulan sekali di yogyakarta. Yayasan Annisa Swasti pendampingan sekitar 150 buruh gendong yang dibina oleh Yayasan Annisa Swasti. Di dalam pendampingan ini memberi training 2-3 kali (tidak rutin), kegiatannya pemeriksaan kesehatan, koperasi, simpan pinjam pelaksanaan 1 bulan sekali, diskusi, hari – hari tertentu mengadakan kegiatan baksos, penelitian.

Dana yang diperoleh dari donatur dan bantuan – bantuan barang untuk buruh dan lain sebagainya. Kegiatan yang lain dari Yayasan Annisa Swasti pendampingan anak – anak putus sekolah dan pendampingan yang lainnya, yang sekarang masih pendampingan yakni buruh gendong. Salah satunya perdagang atau buruh gendong yang bernama ibu rubiyem yang berjualan di pasar Bringharjo. Untuk itu penelitian yang sekarang ini terhimpun sebagai acuan di dalam penelitian selanjutnya.

Pemberdayaan perempuan yang diadakan oleh Yayasan Anissa Swasti (Yasanti) membina buruh – buruh yang ada di pasar Bringharjo dalam kegiatan pendampingan dalam kesehatan, penyuluhan, koperasi, simpan pinjam dan barang yang diperlukan oleh buruh

7. Definisi Konsepsional

Adalah gambaran pemikiran tentang gejala – gejala atau fakta – fakta yang akan menjadi obyek penelitian atau dengan kata lain merupakan suatu pengertian dari gejala yang menjadi pokok pengertian, dengan maksud bahwa definisi ini dapat memberigambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam pokok masalah. Untuk menghindari kekeliruan dan pemahaman dari konsep – konsep yang akan digunakan maka akan diberikan batasan pengertian konsepsional. Sebagai berikut :

- a. **Peranan** adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu atau organisasi dalam masyarakat.
- b. **Lembaga Swadaya Masyarakat** adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk secara sukarela atas kehendak sendiri dan keinginan sendiri ditengah masyarakat, dan minat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
- c. **Peranan LSM** adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu atau organisasi/lembaga yang dibentuk secara sukarela atau kehendak sendiri ditengah masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
- d. **LSM Yasanti** adalah suatu lembaga hukum yang bertujuan dapat melakukan penguatan menuju kemandirian perempuan. Penguatan dalam arti dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

- e. **Pemperdayaan Buruh Gendong** adalah kehidupan politik demokratis dan ekonomi moderen, baik itu kapitalis maumaupun itu sosialis, telah membangkitkan tentang hak - hak perempuan, Dimana perempuan tidak lagi dijadikan anggota masyarakat kelas dua, sebagaimana terjadi pada masyarakat – masyarakat feodal, dan mereka menolak diberikan hak milik laki- laki bahkan mereka menolak bersetatus sosial lebih rendah dari laki – laki dan mereka menuntut kesetaraan disegala bidang.
- f. **Gender** adalah pada dasarnya konstruksi, justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan tuhan dan justru sering dianggap atau dinamakan sebagai kodrat wanita adalah komtruksi sosial dan kultural atau Jender.
- g. **Buruh Gendong**

Untuk membina buruh – buruh gendong pendampingan yang dilakukan oleh Yasanti merupakan bagian program pendampingan Dalam hal ini terdapat hal ini terdapat dua hal yang menentukan arti kata buruh yakni :

- 1) Bekerja pada majikan di perpustakaan yang diwajibkan di perusahaan yang diwajibkan memberi tujangan.
- 2) Memberikan upah sebagai ganti dari pekerjaan yang diberikan. Jadi buruh adalah mereka yang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam produksi. Kata lain buruh adalah mereka yang menghasilkan sesuatu barang dan memberikan pelayanan yang

D. Definisi Operasional

Merupakan hal – hal yang lebih kongkret dan nyata yang ada dilapangan termasuk perincian data atau dengan kata lain bahwa defisioperasional merupakan bagian dari suatu yang memberi tahu bagaimana cara mengukur suatu variabel. Definisi Operasional dari Peranan LSM Yasanti dalam pemberdayaan perempuan di Yogyakarta, akan memakai indikator – indikator pengukuran variabel berikut :

- a. Peranan LSM adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu atau organisasi/lembaga yang dibentuk secara sukarela atau kehendak sendiri ditengah masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
- b. Kebijakan yang menentukan di dalam program pendampingan Yasanti sebagai berikut:
 - 1) *Mengetahui* besar masalah.
 - 2) *Seporting function* : mengatasi masalah
 - 3) *Holisting* (menyeluruh) : penanganan diarahkan pada keluarga dan masyarakat.
 - 4) *Eanpowerment* (pemberdayaan) : pendampingan dilakukan untuk menyelesaikan masalah sendiri.

Program yang dikembangkan dalam masalah buruh gendong adalah :

- Program penelitian dan pengendalian
 - Program dokumentasi kasus
 - Program klinik
 - Program *community basic organization*.
- c. Agenda dilapangan
- Pendampingan
 - Penyuluhan
 - Pelatihan
 - Diskusi
 - Bakti sosial
 - Pemeriksaan kesehatan terhadap buruh gendong.
- d. Kegiatan YASANTI secara garis besar dibagi dalam 3 divisi sebagai berikut :

1) Divisi Penguatan Organisasi di Tingkat Basis

Merupakan divisi yang melakukan pengorganisasian dan penguatan di komunitas dampingan. Kegiatan – kegiatan tersebut adalah :

a) Buruh Sektor Industri

- Pendampingan kelompok.
- Pendidikan dan Pelatihan Perburuh (Pengorganisasian, Penyadaran Gender, Advokasi, Kepemimpinan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan lain-lain)
- Diskusi Reguler
- Jaringan.

b) Buruh Gendong di Yogyakarta

- Pendampingan kelompok
- Pendidikan dan Pelatihan (Pengorganisasian, Penyadaran Gender, Kepemimpinan, Kewirausahaan, Kesehatan Reproduksi, dan lain-lain)
- Pendidikan bebas buta huruf
- Diskusi Reguler
- Kelompok UB (Usaha Bersama)
- Jaringan.

2) Divisi Adminitrasi dan Kesekretariatan

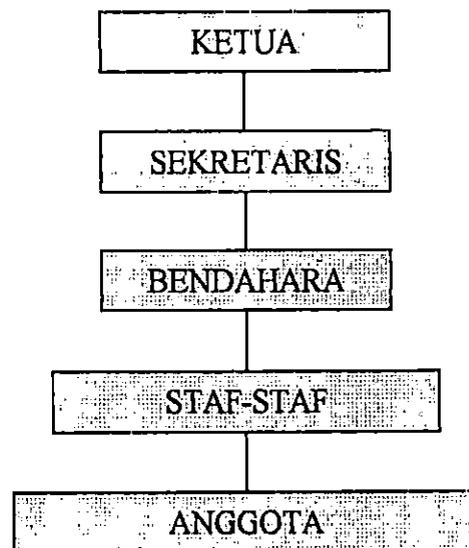
Divisi ini menangani urusan adminitrasi yang menunjang seluruh kegiatan di YASANTI meliputi pengelolaan keuangan. Kesekretariatan yang lebih bersifat internal.

3) Divisi Kajian dan Dokumentasi

Kegiatan divisi kajian adalah membuat penerbitan, pengumpulan informasi, analisis dan pengajian tentang perburuhan, gender dan perempuan.

Kegiatan divisi dokumentasi adalah melakukan pengelolaan perpustakaan, pembuatan dokumentasi berupa foto, rekaman proses, photoslide dan pengelolaan e-mail Struktur Organisasi Yayasan Annisa

Stuktur Organisasi Yayasan Annisa Swasti



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode deskriptif komulatif yang secara teknis didefinisikan sebagai suatu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena didalam konteks yang tidak tampak secara tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Dengan demikian, pada penelitian ini tidak hanya menggambarkan serangkaian peristiwa, fenomena atau fakta yang berkenan dengan masalah semata melainkan juga membedakan masalah – masalah kontekstual dengan mengeksplorasi obyek penelitian sedalam mungkin.

2. Tujuan dan manfaat penelitian

Dalam penelitian ini, bertujuan dan manfaat untuk :

- Mengetahui bagaimana peran LSM sektor informal di kotamadya Yogyakarta.
- Mengetahui bagaimana LSM dan pemerintah kotamadya yogyakarta menanggapi dan merespon kegiatan yang diadakan oleh yayasan Annisa Yasanti terhadap buruh gendong tuntutan yang dilakukan oleh organisasi kepemimpinan buruh.

3. Jenis Data

Untuk memperoleh sumber data dapat diperoleh dengan dua macan

- a. Data Primer : Sumber-sumber yang memberi data secara langsung dari hasil wawancara. Dalam hal ini adalah : YAYASAN ANNISA SWASTI DI YOGYAKARTA.
- b. Data sekunder : Sumber – sumber yang menggunakan atau memperoleh dari dokumen. Data dari sumber skunder dapat diperoleh berdasarkan laporan-laporan kegiatan pada obyek penelitian / DOKUMEN.

4. Unit Analisa Data

Prof. Dr. Hadari Nawawi, mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan teknik pengambilan sampel adalah :

“Cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat – sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar – benar mewakili populasi”.

Dalam Methodologi penelitian penelitian survai, banyak sekali teknik yang dapat digunakan dalam pengambilan sampel yang salah satunya adalah *“Teknik Purposive Sampling”*. Teknik inilah yang penulis gunakan dalam pengambilan sampel dilapangan. Dalam teknik purposive sampling, ukuran atau sampel tidak dipersoalkan, dan pengambilan sampelnya disesuaikan dengan tujuan penelitian atau dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria – kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini, penulis bertujuan ingin mengetahui peran organisasi pedagang kaki lima dalam mengartikulasi kepentingan anggotanya

Untuk itu, sampel yang penulis ambil adalah Buruh Gendong yang dirasakan perlu. Akan tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif dari penelitian ini, maka selain Buruh Gendong, penulis juga menjadi instansi – instansi yang terkait sebagai sampel.

Berikut ini, lembaga – lembaga yang menjadi sebagai sampel atau unit analisa data (unit penelitian) yang juga merupakan responden dalam penelitian ini :

- a. Lsm Yasanti
- b. Buruh Gendong.

F. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus, maka instrumen – instrumen yang digunakan antara lain :

a. Orservasi

Observasi menurut Sutrisno Hadi dapat diartikan sebagai berikut :

“Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena – fenomena yang diselidiki” Hasil dari sistematika tersebut berupa data deskriptif yang aktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan keadaan manusia dan sistem sosial dengan kontek dan dinamika kegiatan – kegiatan itu berlangsung

b. Dokumentasi

Menurut Winarno Surachman, teknik dokumentasi adalah sebagai berikut :

“Laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan tertulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa itu.” Untuk memperoleh dengan dua macam cara, yaitu:

- Sumber primer : Sumber – sumber yang memberi data secara langsung dari tangan pertama. Dalam hal ini adalah : Pertama, Yayasan annisa swasti (Yasanti), organisasi kepemimpinan buruh, sumber pemerintah Yogyakarta, pustaka.
- Sumber Sekunder : Sumber – sumber yang menggunakan atau memperoleh dari sumber lain. Data dari sumber sekunder dapat diperoleh berdasarkan laporan – laporan kegiatan pada obyek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara sebagaimana didefinisikan oleh Lexy J. Moleong adalah :

“Percakapan dengan maksud tertentu yang dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

(Interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Wawancara yang akan disampaikan untuk penelitiannya itu dengan pimpinan buruh yang bersangkutan dan juga wawancara dengan pimpinan

LSM untuk bisa memberi masukan dalam penelitian ini untuk itu dalam wawancara yang menyangkut isi tentang LSM dan buruh.

d. Kepustakaan

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang lebih jelas melalui teori dalam buku yang digunakan sebagai panduan dan acuan dalam penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Nasution, dalam metode penelitian kualitatif atau metode yang di dasarkan pada kualitas data yang sesungguhnya yakni bukan dengan angka - angka statistika yang biasanya di pergunakan oleh metode kuantitatif, kualitas data itu bisa dilihat dari keabsahan, baik pernyataan, opini dikenal tiga cara yang umum digunakan dalam melakukan analisa data, yaitu :

- Memakai metodologi penelitian
- Dengan kajian masing – masing variable
- Dengan sistematis data yang Dianalisa

Untuk kesimpulan analisa data ini di verifikasi selama penelitian